

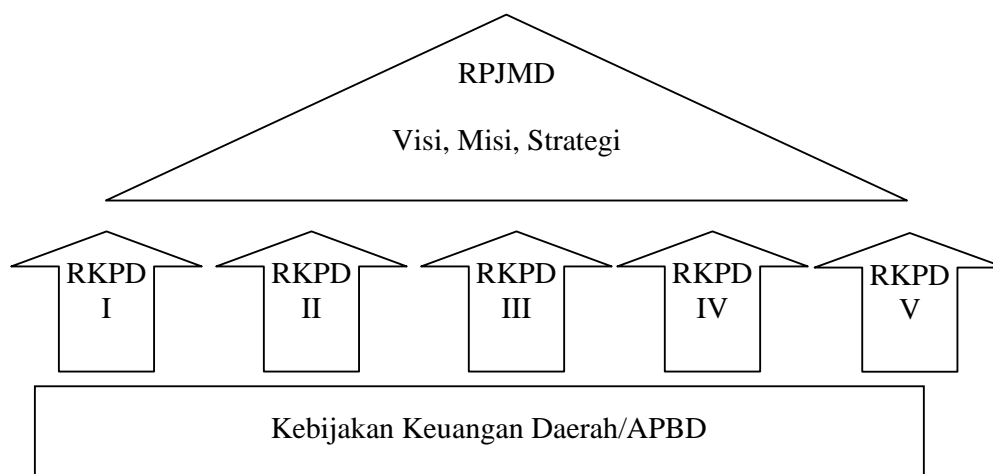
BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya, dimana dalam dokumen RPJMD ini adalah periode 2006 - 2010.

Hubungan antara dokumen perencanaan strategis dengan anggaran, dapat dilihat dalam gambar berikut :



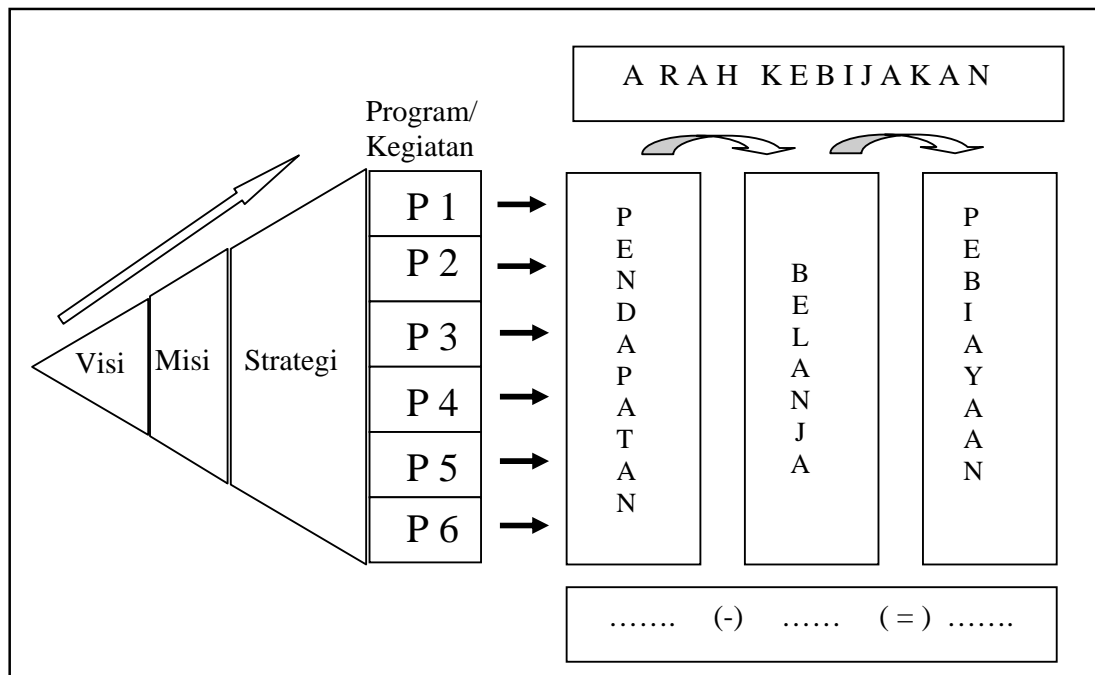
Gambar 3.1.
Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD
Dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun.

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Grobogan mengandung makna bahwa :

- a. Arah belanja APBD Kabupaten Grobogan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas startegis jangka menengah, 5 tahunan ;
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBD dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 3.2
Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Grobogan pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*no value added*) diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan .

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2006 -2010

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006-2010 memberikan gambaran tren yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,34 %, walaupun pada masa itu terjadi kenaikan harga BBM yang sempat mengguncangkan perekonomian nasional dan membawa dampak yang signifikan pada perekonomian secara makro. Namun dikarenakan perekonomian Kabupaten Grobogan berbasis pada sektor pertanian yang merupakan sektor primer sehingga dampak kenaikan harga BBM tidak begitu terasa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan selama tahun 2006 – 2010 menunjukkan angka perkembangan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 nilai realisasi PAD mencapai Rp. 4.1921.570.931,- dan meningkat terus dari tahun ke tahun sampai mencapai Rp. 78.364.888.399,- pada tahun 2010. Demikian pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan terus menerus selama kurun waktu 2006 – 2010 yaitu dari sebesar Rp. 597.126.310.190,- pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp. 746.052.421.038,- pada tahun 2010. Namun demikian sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah cenderung berkembang fluktuatif selama tahun 2007 – 2010, dimana pada tahun 2007 mencapai nilai sebesar Rp. 65.826.437.772,- menurun selama dua tahun berikutnya masing-masing menjadi Rp. 64.165.806.639,- pada tahun 2008 dan Rp. 52.971.292.647,- pada tahun 2009, sebelum kemudian meningkat sangat tajam pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 119.548.293.707,-.

Gambaran perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 s/d 2010

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.921.570.931	53.458.621.480	59.924.849.995	76.776.418.078	78.364.888.399
	Pajak Daerah	9.387.115.450	9.431.471.476	9.164.095.556	11.169.301.732	15.104.906.059
	Retribusi Daerah	22.457.920.185	28.111.719.413	29.910.218.734	45.107.615.394	48.712.800.832
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.092.284.973	2.345.158.147	2.445.426.705	2.838.319.156	2.942.439.032
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7.984.250.323	13.570.272.444	17.405.109.000	17.661.181.796	11.604.742.476
2.	DANA PERIMBANGAN	597.126.310.190	631.220.514.573	688.986.155.873	713.129.581.551	746.052.421.038
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	40.751.671.356	57.196.514.573	53.944.198.873	53.918.290.551	60.752.838.038
	Dana Alokasi Umum (DAU)	512.838.000.000	563.699.000.000	615.030.004.000	614.891166.000	617.827.183.000
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	13.020.000.000	10.325.000.000	10.325.000.000	26.808.000.000	67.472.400.000
	Dana Perimbangan dari Provinsi	30.516.638.834	-	9.686.953.000	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		65.826.437.772	64.165.806.639	52.971.292.647	119.548.293.707
	Dana Hibah		10.000.000.000	-	-	-
	Dana Darurat		-	14.300.000.000	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		25.641.843.012	32.167.322.389	-	37.955.403.707
	Dana bagi Hasil pajak dari Prov.		10.000.000.000	-	40.747.992.647	59.847.060.000
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lain		20.184.594.760	17.698.484.250	12.233.300.000	21.745.830.000
	JUMLAH	639.047.881.121	750.505.573.825	813.076.812.507	842.877.292.300	943.965.603.144
	% Kenaikan Realisasi Pendapatan Pertahun	-	17,44	8,34	3,87	11,99
	Rata-rata Kenaikan 2006 – 2010			10,36		

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

Kontribusi PAD pada pembentukan Pendapatan Daerah secara keseluruhan selama tahun 2006 – 2009 walaupun masih relatif kecil namun dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sebelum sedikit menurun pada tahun 2010. Pada tahun 2006 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah baru mencapai 6,56 persen dan meningkat menjadi 7,12 persen pada tahun 2007, kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 – 2009 dengan angka proporsi masing-masing sebesar 7,37 persen dan 9,11 persen. Pada tahun 2010 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah ini sedikit menurun menjadi sebesar 8,30 persen. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah ini menunjukkan rasio kemampuan keuangan daerah atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan selama tahun 2006 – 2010 mendominasi walaupun perkembangannya berfluktuasi dan cenderung menurun. Tahun 2006 kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencapai 93,44 persen dan menurun menjadi 84,11 persen pada tahun 2007, kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar 88,74 persen. Pada tahun 2009 kontribusi Dana Perimbangan kembali menurun menjadi sebesar 84,61 persen dan pada tahun 2010 menurun lagi menjadi sebesar 79,03 persen.

Perkembangan PAD Kabupaten Grobogan selama tahun 2006 – 2010 tersebut terutama didominasi oleh perkembangan penerimaan Retribusi Daerah yang selama kurun waktu itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2006 nilai realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp. 22.457.920.185,- dan meningkat terus menerus masing-masing menjadi Rp. 28.111.719.413,- tahun 2007, Rp. 29.910.218.734,- tahun 2008, Rp. 45.107.615.394,- tahun 2009 dan Rp. 48.712.800.832,- pada tahun 2010.

Meskipun secara nominal mengalami peningkatan terus menerus, Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan memiliki kontribusi yang menurun selama tahun 2006 – 2008 terhadap total Pendapatan Daerah. Walaupun dua tahun terakhir yaitu tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan lagi.

Pada tahun 2006 kontribusi retribusi daerah sebesar 53,37 persen dan menurun pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing menjadi sebesar 52,59 persen dan 49,91 persen. Namun pada tahun 2009 dan 2010 meningkat lagi dengan angka masing-masing menjadi sebesar 58,75 persen dan 62,16 persen.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai salah satu komponen PAD yang memiliki kontribusi terkecil dan selama tahun 2006 – 2010 ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2006 kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya mencapai 4,99 persen dan menurun menjadi 4,39 persen pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 dan 2009 kontribusi terus menurun masing-masing menjadi sebesar 4,08 persen dan 3,70 persen, sebelum kemudian sedikit meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi sebesar 3,75 persen.

Kontribusi Pajak Daerah selama tahun 2006 – 2010 juga cenderung mengalami penurunan terutama pada tahun 2006 – 2009. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2006 mencapai 22,39 persen dan menurun menjadi 17,64 persen pada tahun 2007 serta menurun lagi menjadi 15,29 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2009 kontribusi Pajak Daerah ini menurun lagi menjadi 14,55 persen sebelum mengalami kenaikan lagi pada tahun 2010 menjadi sebesar 19,28 persen.

Kontribusi sumber PAD yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah selama tahun 2006 – 2010 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2006 kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap total PAD mencapai 19,05 persen dan meningkat pada dua tahun kemudian menjadi 25,38 persen dan 29,04 persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing menjadi sebesar 23,00 persen dan 14,81 persen.

Secara total Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2006 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan fluktuatif dan rata-rata pertumbuhannya mencapai 10,36 persen per tahun.

Pada sisi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, nampak bahwa perkembangan Belanja Tidak Langsung Daerah cenderung lebih cepat dibandingkan laju perkembangan Pendapatan Daerah. Selama tahun 2006 – 2010, pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Grobogan meningkat rata-rata sebesar 14,59 persen per tahun. Pada sisi lain perkembangan Belanja Langsung Daerah selama kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,65 persen per tahun, sehingga secara keseluruhan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan selama tahun 2006 – 2010 meningkat rata-rata sebesar 12,27 persen per tahun.

Rincian perkembangan belanja daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 s/d 2010

NO	URAIAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	373.634.780.907	419.787.946.791	508.440.114.095	555.190.632.467	642.416.058.857
1	Belanja Pegawai	323.627.037.000	372.017.122.881	447.885.987.549	486.853.346.004	553.408.923.631
2	Belanja Bunga	-	82.115.035	641.661.259	3.955.243.628	2.261.205.632
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	31.425.159.609
4	Belanja Hibah	8.242.425.632	400.000.000	12.489.000.000	22.434.565.000	28.255.753.480
5	Belanja Bantuan Sosial	23.592.800.825	25.378.514.855	22.519.381.937	15.624.735.859	740.832.000
6	Belanja Bagi Hasil	17.810.017.100	799.956.100	740.737.100	740.832.000	26.160.548.141
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	20.667.156.894	24.138.326.250	23.683.296.420	163.636.364
8	Belanja Tidak Terduga	362.500.000	443.0810.025	25.020.000	1.898.613.555	-
	Persentase Kenaikan Pertahun	-	12,35	21,12	9,19	15,71
	Rata-rata Kenaikan	14,59				
II	BELANJA LANGSUNG	208.530.931.162	319.906.379.419	362.211.946.229	258.149.064.414	259.722.699.159
1	Belanja Pegawai	-	42.105.694.666	41.148.353.703	43.072.762.117	37.405.738.955
2	Belanja Barang dan Jasa	127.835.244.108	117.392.031.548	138.009.347.307	117.604.406.627	130.717.703.081
3	Belanja Modal	80.695.687.054	160.408.653.205	183.054.245.219	97.471.895.670	91.599.257.123
	Persentase Kenaikan Pertahun	-	53,41	13,22	(28,73)	0,61
	Rata-rata Kenaikan	9,65				
	Jumlah	582.165.712.069	739.694.326.210	870.652.060.324	813.339.696.881	902.138.758.016
	Persentase Kenaikan Pertahun	-	27,06	17,70	(6,48)	10,92
	Rata-rata Kenaikan	12,27				

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

Tabel 3.3
Rasio Realisasi Pendapatan dengan Belanja Dalam Tahun Berjalan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 s/d 2010

NO	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pendapatan	639.047.881.121	750.505.573.825	813.076.812.507	842.877.292.300	943.965.603.144
2	Belanja	582.165.712.069	739.694.326.210	870.652.060.324	813.339.696.881	902.138.758.016
	Persentase Belanja terhadap Pendapatan	91,10	98,56	107,08	96,50	95,57

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 – 2010

URAIAN	TAHUN				
	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN	639.047.881.121	750.505.573.825	813.076.812.507	843.180.476.379	943.965.603.144
BELANJA	582.165.712.069	739.694.326.210	870.652.060.324	813.339.696.881	902.138.758.016
SURPLUS/DEFISIT	56.882.169.052	10.811.247.615	57.575.247.817	29.840.779.498	902.138.758.016
Penerimaan Pembiayaan	8.582.531.374	68.313.553.308	140.105.609.213	92.454.014.781	65.472.509.071
Pengeluaran Pembiayaan	9.132.606.207	15.440.890.025	24.792.689.541	72.642.255.976	43.290.933.393
PEMBIAYAAN NETTO	550.074.833	52.872.663.283	115.312.919.672	19.811.758.805	22.181.575.678
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkecukupan	56.332.094.219	63.683.910.898	57.737.671.855	49.652.538.303	64.008.420.806

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

Tabel 3.5
Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 s/d 2010

URAIAN	TAHUN					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aset Aktiva Lancar	28.897.324.621,09	77.772.583.218,51	104.479.062.703,62	95.543.168.832,79	116.676.136.705,96	121.298.444,00
Aset Investasi Jangka Panjang	7.139.556.338,92	9.527.726.903,00	16.946.457.414,11	24.252.363.713,48	22.211.305.126,32	22.152.520,00
Aset Aktiva Tetap	2.220.783.433.943,00	2.349.807.580.646,05	2.535.557.614.934,05	1.652.236.028.628,31	1.710.446.378.216,28	1.902.579.590,00
Aset Dana Cadangan		-	-	-	1.000.000.000,00	
Aset Aktiva Lain	6.600.139.906,00	6.518.904.906,00	-	577.278.500,00	787.074.000,00	9.846.960,00
Total	2.263.420.454.809,01	2.443.626.795.673,56	2.656.983.135.051,78	1.772.608.839.674,58	1.851.120.894.048,56	2.055.877.520,00

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

Tabel 3.6

Hutang / Kewajiban Kabupaten Grobogan Tahun 2006 s/d 2010

URAIAN	TAHUN			
	2006	2007	2008	2009
Kewajiban Jangka Pendek	9.636.959.313,66	1.123.142.603,00	10.344.718.618,81	2.195.832.
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
Total	9.636.959.313,66	1.123.142.603,00	10.344.718.618,81	2.195.832.

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

Tabel 3.7
Ekuitas Dana Kabupaten Grobogan Tahun 2006 s/d 2010

URAIAN	TAHUN (Rp. 000)			
	2006	2007	2008	2009
Dana Lancar	68.203.198.904,85	103.356.162.075,62	85.198.450.213,98	114.480.304.02
Dana Investasi	2.365.556.812.455,75	2.552.504.072.348,16	1.677.065.670.841,79	1.757.630.600.54
Dana Cadangan	-	-	-	1.000.000.00
Total	2.434.057.411.360,60	2.655.860.234.423,78	1.762.264.121.055,77	1.873.110.904.56

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

Tabel 3.8
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Kabupaten Grobogan Tahun 2006 s/d 2010

URAIAN	TAHUN (Rp. 000)			
	2006	2007	2008	2009
Total Utang dan Ekuitas Dana	2.443.694.370.674,26	2.656.983.377.026,78	1.772.608.839.674,58	1.875.306.737.24

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2006 - 2010

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2006 – 2010

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah

menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari provinsi.

Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controlability*-nya lebih tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Upaya yang dilakukan meliputi :

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi

Dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Indikator keberhasilan program ini adalah meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB.

2) Koordinasi/sinkronisasi lintas sektoral

Dimaksudkan untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah. Indikator keberhasilan program ini berupa peningkatan pembangunan

3) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya penggalan dan pelayanan

penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam jangka pengelolaan pajak daerah melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan.

3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2006 – 2010

Suatu arah pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBD. Belanja daerah diarahkan untuk seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang terformulasikan dalam program dan kegiatan. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja aparatur, belanja publik serta belanja tidak langsung.

Pos belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja wajib yang dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib yang dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.

3.2.3. Arah Pembiayaan Tahun 2006 – 2010

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2011 – 2015

Kuangan daerah dalam bentuk PAD menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBD Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tugas-tugas

otonomi daerah masih sangat kecil.

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalan PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari propinsi serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Grobogan.

Tahap perencanaan Pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan. Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh. Pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi yang menyebabkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah baik jumlahnya maupun pengelolaannya. Disinilah Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan satu kebijakan perencanaan pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan serta pemberian stimulan maupun motivasi dalam pengembangan UMKM, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta bantuan kepada organisasi kemasyarakatan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi misi dan kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa

Hal yang tidak kalah penting dalam mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk sinergitas program dana dekonsentrasi dan hibah/bantuan langsung kepada masyarakat.

3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Secara umum setiap pemerintahan kabupaten/kota pada waktu menyusun rancangan APBD akan menganut "prakiraan maju" (*forward estimate*) yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya. Biasanya hal ini akan mengakibatkan dampak positif terhadap posisi keuangan pemerintah daerah karena adanya sisa lebih perhitungan anggaran.

Dari sisi perencanaan penganggaran tingginya angka SiLPA dan Pembiayaan Kegiatan Lanjutan dapat diartikan kurang matangnya perencanaan baik dari sisi pendapatan dan/ atau belanja sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Penganggaran yang cukup besar dan/ atau kebijakan belanja ketat yang berlebihan.

Tabel 3.9
Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2011-2016

No	Jenis Pendapatan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.364.888.399	93.599.755.142	111.963.319.205	134.147.361.354	160.981.070.677	193.479.375.411	232.885.579.323
	Realisasi Kenaikan	15.234.866.743	18.363.564.063	22.184.042.149	26.833.709.323	32.498.304.734	39.406.203.911	47.432.118.319
	Rata-Rata per tahun	13,69	19,44	19,62	19,81	20,00	20,19	20,37
1	Pajak Daerah	15.104.906.059	17.172.767.698	19.534.023.257	22.229.718.466	25.308.534.474	28.826.420.766	32.847.706.463
	Realisasi Kenaikan	2.067.861.639	2.361.255.559	2.695.695.209	3.078.816.008	3.517.886.292	4.021.285.697	4.598.678.905
	Rata-Rata per tahun	13,69	13,75	13,80	13,85	13,90	13,95	14,00
2	Retribusi Daerah	48.712.800.832	59.717.022.540	73.213.069.634	89.795.829.906	110.179.483.295	135.245.315.744	166.081.247.734
	Realisasi Kenaikan	11.004.221.708	13.496.047.094	16.582.760.272	20.383.653.389	25.065.832.450	30.835.931.990	37.949.565.107
	Rata-Rata per tahun	22,59	22,60	22,65	22,70	22,75	22,80	22,85
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.942.439.032	3.207.847.033	3.499.761.113	3.819.989.254	4.171.428.266	4.557.285.380	4.981.112.921
	Realisasi Kenaikan	265.408.001	291.914.080	320.228.142	351.439.011	385.857.115	423.827.540	465.734.058
	Rata-Rata per tahun	9,02	9,10	9,15	9,20	9,25	9,30	9,35
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	11.604.742.476	13.502.117.871	15.716.465.202	18.301.823.727	21.321.624.642	24.850.353.521	28.975.512.205
	Realisasi Kenaikan	1.897.375.395	2.214.347.331	2.585.358.526	3.019.800.915	3.528.728.878	4.125.158.684	4.824.422.782
	Rata-Rata per tahun	16,35	16,40	16,45	16,50	16,55	16,60	16,65
B	DANA PERIMBANGAN	746.052.421.038	832.347.036.146	895.444.616.372	966.159.421.268	1.045.718.550.875	1.135.578.370.158	1.237.470.521.324
	Realisasi Kenaikan	86.294.615.108	63.097.580.226	70.714.804.896	79.559.129.607	89.859.819.283	101.892.151.166	115.987.011.740
	Rata-Rata per tahun	5,75	11,57	7,58	7,90	8,23	8,59	8,97
1	Dana Bagi hasil pajak/bukan Pajak	60.752.838.038	67.933.823.494	75.983.981.578	85.026.075.386	95.186.691.395	106.609.094.362	119.455.490.233
	Realisasi Kenaikan	7.180.985.456	8.050.158.084	9.042.093.808	10.160.616.009	11.422.402.967	12.846.395.871	14.454.114.318
	Rata-Rata per tahun	11,82	11,85	11,90	11,95	12,00	12,05	12,10

No	Jenis Pendapatan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Dana Alokasi Umum	617.827.183.000	647.915.366.812	679.663.219.786	713.306.549.165	748.971.876.624	786.794.956.393	826.921.499.169
	Realisasi Kenaikan	30.088.183.812	31.747.852.974	33.643.329.379	35.665.327.458	37.823.079.769	40.126.542.776	42.586.457.207
	Rata-Rata per tahun	4,87	4,90	4,95	5,00	5,05	5,10	5,15
3	Dana Alokasi Khusus	67.472.400.000	116.497.845.840	139.797.415.008	167.826.796.717	201.559.982.857	242.174.319.403	291.093.531.922
	Realisasi Kenaikan	49.025.445.840	23.299.569.168	28.029.381.709	33.733.186.140	40.614.336.546	48.919.212.519	58.946.440.214
	Rata-Rata per tahun	72,660	20,00	20,05	20,10	20,15	20,20	20,25
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.548.293.707	131.207.379.790	144.074.788.417	158.279.661.832	173.968.032.773	191.302.580.085	210.464.600.518
	Realisasi Kenaikan	11.659.086.083	12.867.408.628	14.204.873.414	15.688.370.941	17.334.547.312	19.162.020.433	21.191.621.859
	Rata-Rata per tahun	26,43	9,75	9,81	9,86	9,91	9,96	10,02
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	59.847.060.000	65.831.766.000	72.447.858.483	79.765.092.190	87.861.249.047	96.823.096.450	106.747.463.836
	Realisasi Kenaikan	5.984.706.000	6.616.092.483	7.317.233.707	8.096.156.857	8.961.847.403	9.924.367.386	10.994.988.775
	Rata-Rata per tahun	10,00	10,05	10,10	10,15	10,20	10,25	10,30
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.955.403.707	41.750.944.078	45.946.913.958	50.587.552.267	55.722.188.822	61.405.852.082	67.699.951.921
	Realisasi Kenaikan	3.795.540.371	4.195.969.880	4.640.638.310	5.134.636.555	5.683.663.260	6.294.099.838	6.973.095.048
	Rata-Rata per tahun	10,00	10,05	10,10	10,15	10,20	10,25	10,30
3	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau pemda lainnya	21.745.830.000	23.624.669.712	25.680.015.977	27.927.017.375	30.384.594.904	33.073.631.553	36.017.184.761
	Realisasi Kenaikan	1.878.839.712	2.055.346.265	2.247.001.398	2.457.577.529	2.689.036.649	2.943.553.208	3.223.538.036
	Rata-Rata per tahun	8,64	8,70	8,75	8,80	8,85	8,90	8,95
	TOTAL PENDAPATAN	943.965.603.144	1.057.154.171.078	1.151.482.723.995	1.258.586.444.455	1.380.667.654.326	1.520.360.325.654	1.680.820.701.164
	Realisasi Kenaikan	113.188.567.934	94.328.552.917	107.103.720.460	122.081.209.871	139.692.671.329	160.460.375.510	184.610.751.918
	Rata-Rata per tahun	10,36	11,99	8,92	9,30	9,70	10,12	10,55

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010

Tabel 3.10
Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2010-2016

No	URAIAN	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN	943.965.603.144	1.057.154.171.078	1.151.482.723.995	1.258.586.444.455	1.380.667.654.326	1.520.360.325.654	1.680.820.701.164
2	TOTAL BELANJA = A + B	902.138.758.016	1.021.559.628.234	1.157.986.178.799	1.313.770.543.146	1.491.793.363.887	1.695.380.915.511	1.928.376.336.075
	Kenaikan per tahun	119.420.870.218	136.426.550.565	155.784.364.347	178.022.820.741	203.587.551.623	232.995.420.565	266.846.236.964
	Rata-rata kenaikan	12,27	13,24	13,35	13,45	13,55	13,65	13,74
	DEFISIT	41.826.845.128	35.594.542.843	(6.503.454.804)	(55.184.098.692)	(111.125.709.562)	(175.020.589.856)	(247.555.634.911)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	642.416.058.857	736.825.633.146	845.632.986.188	970.962.914.255	1.115.390.587.365	1.281.902.465.501	1.473.963.519.514
	Kenaikan per tahun	94.409.574.289	108.807.353.041	125.329.928.068	144.427.673.110	166.511.878.136	192.061.054.014	221.632.161.716
	Rata-rata kenaikan	14,59	14,70	14,77	14,82	14,87	14,93	14,98
	PROSENTIS TOTAL BELANJA	71,21	72,13	73,03	73,91	74,77	75,61	76,44
1	Belanja Pegawai (Gaji)	553.408.923.631	633.265.831.311	725.089.376.851	830.589.881.183	951.856.003.836	1.091.302.908.397	1.251.724.435.932
	Kenaikan per tahun	79.856.907.680	91.823.545.540	105.500.504.332	121.266.122.653	139.446.904.562	160.421.527.534	184.629.354.300
	Rata-rata kenaikan	14,43	14,50	14,55	14,60	14,65	14,70	14,75
2	Belanja Tidak Langsung Lainnya	89.007.135.226	103.559.801.835	120.543.609.336	140.373.033.072	163.534.583.529	190.599.557.103	222.239.083.582
	Kenaikan per tahun	14.552.666.609	16.983.807.501	19.829.423.736	23.161.550.457	27.064.973.574	31.639.526.479	37.002.807.416
	Rata-rata kenaikan	16,35	16,40	16,45	16,50	16,55	16,60	16,65
B	BELANJA LANGSUNG	259.722.699.159	284.733.995.088	312.353.192.612	342.807.628.891	376.402.776.523	413.478.450.010	454.412.816.561
	Kenaikan per tahun	25.011.295.929	27.619.197.524	30.454.436.280	33.595.147.631	37.075.673.487	40.934.366.551	45.214.075.248
	Rata-rata kenaikan	9,63	9,70	9,75	9,80	9,85	9,90	9,95
	PERSENTASE TOTAL BELANJA	28,79	27,87	26,97	26,09	25,23	24,39	23,56
	PERSENTASE TOTAL BELANJA	28,79	27,87	26,97	26,09	25,23	24,39	23,56

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan Tahun 2010